

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Melaksanakan pembangunan di desa sebagai implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Anita (2001:6) menyatakan bahwa: “ Rakyat Indonesia mayoritas ada di pedesaan secara statistik jumlah mereka yang ada di pedesaan sekitar 60-80% dari jumlah penduduk ”. Hal ini dapat dipastikan bahwa desa memiliki potensi yang sangat penting dalam bidang pertanian maupun tenaga kerja, demikian juga dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di desa sudah semestinya pembangunan yang ada di desa ditingkatkan.

Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu

kehidupan masyarakat. Segala aspek–aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Pembangunan disadari pada umumnya berawal dari masyarakat dan akhirnya memang diperuntukkan kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak bertindak sendiri dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi masyarakat diatur dan dikendalikan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tumpang tindih dalam pembangunan.

Pemerintah desa sebagai eksekutif berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan menciptakan kehidupan yang harmonis di desa. Adapun mata pencaharian penduduk desa umumnya adalah petani, dimana untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat desa, pemerintah desa hendaknya melakukan pembangunan.

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta

dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Adakalanya kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tentu saja partisipasi seperti ini suatu merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Seperti yang diungkapkan Adisasmita (2006:37) “Untuk melaksanakan (implementasi) program/proyek pembangunan pedesaan diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan dan terkandungnya semangat bersama, rasa kebersamaan, dan ketersediaan berkorban untuk keberhasilan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa”. Dalam mencapai pembangunan yang diharapkan tidak terlepas daipada partisipasi masyarakat desa, misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintahan desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau tidak peduli terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah ketidak harmonisan.

Keberadaan infrastruktur desa secara tidak langsung juga akan memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi masyarakat desa. Kepala desa

sebagai pemimpin pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pembangunan, hendaknya pembangunan infrastruktur tidak dilupakan.

Pemerintah tidak mungkin akan mampu membiayai sepenuhnya pembangunan infrastruktur. Dalam arti peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Demikian juga dalam hal pemeliharannya, persoalannya dari mana pembiayaannya, sebagai contoh jika infrastruktur di desa rusak siapa yang harus memperbaikinya, walaupun perbaikan itu dilakukan oleh pemerintah sampai kapan pemerintah harus mengadakan infrastruktur ini bagi masyarakat desa dan sampai kapan masyarakat desa terus menunggu datangnya perbaikan dari pemerintah.

Dengan dapat bekerjanya berbagai infrastruktur desa dengan baik, pasti memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, dimana dengan jalan desa yang baik mereka akan dengan mudah menjual hasil pertaniannya ke daerah sentra penjualan, jembatan berfungsi sebagai penghubung antar daerah, maupun dengan irigasi yang baik akan meningkatkan hasil pertanian mereka. Dengan demikian pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Pembangunan infrastruktur

pada dasarnya adalah pembangunan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Melalui penelitian ini peneliti mencari bagaimana peranan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur. Sudah terdapat sikap yang mendukung atau tidak yang akan mempengaruhi perkembangan pembangunan infrastruktur di desa ini. Dan apakah masyarakat ikut berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini perlu sekali diperhatikan, karena didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tanpa adanya peran serta masyarakat pembangunan itu tidak akan terlaksana dengan baik dan belum tentu pembangunan itu diterima masyarakat setempat.

Jadi pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai proyek pemerintah. Tapi masyarakat juga harus menganggap bahwa proyek pemerintah itu harus sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tapi yang paling penting adalah masyarakat dianggap sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan infrastruktur. Pemerintah dan masyarakat hendaknya terjalin keharmonisan hubungan kerja, saling menghargai, saling menghormati, saling mempercayai, saling membantu dan saling menasehati satu dengan yang lain, saling memberikan dan menerima (*take*

*and give*) dan saling mau menerima pendapat dan pandangan orang lain manakala kepentingan umum lebih besar dari kepentingan pribadi dan kelompok.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Peranan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dibidang Pembangunan Infrastruktur (studi kasus desa Rumamis Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah berisi sejumlah masalah yang berhasil ditarik dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan dengan perumusan masalah. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang masalah yang diteliti maka perlu diidentifikasi masalah terkait dengan judul diatas, :

1. Apa peranan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Bagaimana cara pemerintahan desa meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur.
3. Apa saja partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan dibidang infrastruktur.
4. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam pembangunan dibidang infrastruktur.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penulis fokus pada masalah yang akan diteliti. Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan

penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembatasan penelitian ini, maka penelitian ini terbatas pada:

1. Apa peranan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Apa saja partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan dibidang infrastruktur.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa peranan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
2. Apa saja partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan dibidang infrastruktur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting untuk dirumuskan dalam suatu kegiatan agar pelaksanaan penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi dalam proses penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa peranan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
2. Untuk mengetahui apa saja partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan dibidang infrastruktur?

## **F. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Jurusan PPKn pada khususnya.
2. Bahan masukan dan sekaligus pemikiran bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur.
3. Menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan berpikir penulis, khususnya dalam bidang penelitian.